

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
INTISARI	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATAPENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Hukum Persaingan Usaha	11

B. Kegiatan yang Dilarang dalam Persaingan Usaha	14
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	21
D. Tinjauan Umum Tender	29
1. Pengertian Tender	29
2. Pengaturan Tender di Indonesia.....	32
3. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Persengkokolan Tender.....	45
1. Pengertian Persengkokolan Tender.....	45
2. Persengkokolan Tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	50
3. Modus Persengkokolan dalam Tender	53
4. Indikasi Persengkokolan dalam Tender	57
5. Unsur-unsur Persengkokolan dalam Tender	62
6. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> Terhadap Persengkokolan dalam Tender	66
7. Pembuktian Persengkokolan dalam Tender	67
8. Sanksi Terhadap Persengkokolan dalam Tender	70
BAB III. METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Jenis Pendekatan.....	75
C. Teknik Pengumpulan Data	75
D. Analisa Data	75

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....76

- A.** Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penegakan
Hukum
Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia
dalam Kasus Persekongkolan..... 76
- B.** Implementasi Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan
dalam Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2013 tentang Dugaan
Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2012..... 94
1. Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/201394
 2. Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999100

BAB V. PENUTUP.....107

- A. Kesimpulan.....107
- B. Saran109

DAFTAR PUSTAKA.....111